

Wacana Lingkungan dalam Gerakan Sosial Digital

Discourse of Environment in Digital Social Movement

Andreas Ryan Sanjaya

Universitas Katolik Soegijapranata

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

ryansanjaya@unika.ac.id

Naskah diterima: 14 Juni 2017, direvisi: 3 Juli 2017, disetujui: 6 Desember 2017

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan salah satu bentuk dari gerakan sosial baru (*new social movement*), yaitu petisi *online*. Gerakan sosial ini ditandai dengan penggunaan teknologi Internet sebagai alat perjuangan yang utama. Secara khusus, peneliti memilih untuk mengelaborasi situs Change.org sebagai situs yang menyediakan *platform* petisi *online*. Melalui situs tersebut, setiap orang dapat mengumpulkan tanda tangan secara digital sebanyak mungkin guna mendukung perjuangan mereka. Tanda tangan yang telah terkumpul tersebut lalu diberikan kepada pihak-pihak terkait, baik pelaku maupun pengambil kebijakan, untuk menyelesaikan persoalan publik yang mereka tuntutkan. Secara khusus peneliti mengeksplorasi isu lingkungan sebagai isu yang vital dan dialami oleh hampir semua wilayah di dunia. Semiotika sosial yang digagas Halliday digunakan untuk membedah isi pengantar dari tuntutan yang mereka lakukan melalui situs Change.org. Analisis dilakukan menggunakan tiga analisis konteks situasi: medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana.

Kata kunci: gerakan sosial baru, petisi *online*, Change.org, semiotika sosial

Abstract

This paper discusses online petition as one of new social movements. This social movement is characterized by the use of Internet technology as a major tool of struggle. Specifically, the authors chose to elaborate Change.org as a site that provides an online petition platform. Through the site, everyone can digitally collect signatures as many as possible in order to support their struggle. The collected signatures are then given to relevant parties, both the actor and the policy maker, to resolve the public issues they are demanding. In particular the authors seek to explore environmental discourse as a critical issue that are being experienced by nearly all regions of the world. Halliday's social semiotics were used to analyze the introductory contents of the demands they made through Change.org website. The analysis was performed using three situational context analyses: field of discourse, tenor of discourse, and mode of discourse.

Keywords: new social movement, online petition, Change.org, social semiotics

PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan adalah isu vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan menjadi sebab sekaligus akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Khan (2013) memotret dua hal yang menyumbang persoalan lingkungan secara dramatis secara global, yaitu ledakan populasi penduduk dan tumbuh suburnya pabrik. Peningkatan polusi karena serbuan pabrik tersebut telah menjadi perhatian kelompok aktivis lingkungan di tingkat dunia.

Masyarakat dunia secara resmi telah melemparkan isu lingkungan sejak tahun 1972. Pada saat itu, tepatnya 5-16 Juni 1972, diadakan konferensi PBB di Stockholm, Swedia, berkenaan dengan lingkungan hidup (www.un-documents.net). Dalam dokumen laporan konferensi tersebut tercantum 26 prinsip. Salah satu prinsipnya mengatakan bahwa setiap jenis sumber daya alam, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, serta ekosistem secara menyeluruh, perlu dijaga untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan kelak. Artinya, telah disepakati secara umum bahwa lembaga secara internasional telah memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup.

Di Amerika Serikat, kalangan pemerhati lingkungan telah bergerak secara radikal sejak dua puluh tahun lalu (Bervington, 2009). Mereka disebut sebagai "*grassroot biodiversity groups*" dan menjadi pahlawan atas kehidupan hutan dan satwa liar. Langkah yang mereka tempuh secara konsisten ialah memerkarakan kasus-kasus lingkungan ke pengadilan setempat.

Sejak saat itu mulai ramai berdiri lembaga-lembaga yang bergerak pada isu penyelamatan lingkungan yang bergerak pada setiap jenisnya. Sebagian lembaga tersebut merupakan turunan dari lembaga PBB, sebagian lain bukan turunan tetapi memiliki hubungan kerja sama yang baik.

Mereka bergerak pada berbagai level, dari lokal hingga internasional, dari aksi langsung hingga desakan secara hukum untuk menanggapi persoalan lingkungan hidup.

Dalam konteks Indonesia, persoalan lingkungan hidup tersebar pada berbagai masalah yang spesifik. Mongabay, sebuah situs berisi informasi khusus isu lingkungan yang didirikan Rhett A. Butler, mencatat persoalan lingkungan di seluruh dunia, termasuk Indonesia (www.mongabay.com). Masalah tersebut antara lain pembukaan lahan dengan membakar hutan, kebakaran lahan gambut, perubahan iklim, dan penjualan ilegal satwa liar yang dilindungi.

Sebagaimana dilakukan pada gerakan lingkungan di tingkat internasional, gerakan di Indonesia juga bergerak mulai dari level kampanye, penggalangan dana, hingga turun langsung untuk menemui pihak-pihak yang dianggap harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Pada era internet, kampanye penyelamatan lingkungan dilakukan secara masif. Selain menggunakan media sosial, para aktivis isu lingkungan atau siapa saja yang tergerak atas isu tersebut, juga bisa menggunakan salah satu wadah yang relatif baru: petisi *online*.

Penelitian ini memotret gerakan aktivis pada salah satu wadah petisi *online* yang ada di Indonesia, yaitu Change.org. Sejak tahun 2007, situs ini didirikan di Amerika Serikat oleh Ben Rattray. Dalam laporannya, redaksi Kompas.com menganggap situs ini memberikan pengaruh yang relatif besar dalam perubahan dalam bidang sosial dan politik di negara tersebut. Dalam waktu singkat, situs tersebut berekspansi dalam berbagai negara, termasuk berdiri di Indonesia tahun 2012.

Secara umum, petisi *online* merupakan cara paling populer yang digunakan aktivis gerakan sosial untuk melancarkan aksinya. Aktivitas ini sering disebut pula dengan istilah aktivisme digital (*digital activism*). Laer & Aelst (2010) menuliskan bahwa cara ini mengandung

risiko yang relatif kecil dan tingkat kesulitan yang rendah, tetapi dengan tingkat keberhasilan yang tak dapat dianggap sepele. Change.org Indonesia mencatat banyak kemenangan (untuk menyebut petisi yang berhasil menggerakkan pihak yang dituju sesuai dengan keinginan pembuat petisi), khususnya dalam isu lingkungan.

Dari pengamatan yang telah dilakukan, persoalan lingkungan memang menjadi hal yang relatif sering dibuatkan petisi. Misalnya dibandingkan dengan isu politik, kemunculan petisi berisu tersebut biasanya hanya muncul mendekati dan sejenak sesudah proses pemilihan umum saja. Sementara itu persoalan lingkungan hampir selalu muncul setiap tahun dengan topik persoalan yang berbeda-beda. Dengan demikian, menurut peneliti, persoalan lingkungan merupakan persoalan yang dianggap berurgensi tinggi.

Mengingat urgensi persoalan lingkungan tersebut, peneliti mengambil rumusan masalah “bagaimana isu lingkungan diwacanakan oleh para aktivis dalam aksi aktivisme digital?”

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk membedah wacana yang digagas oleh para aktivis lingkungan hidup dalam teks pengantar mereka pada lima petisi terpilih di situs Change.org. Teks tersebut bersifat mengantar warga pada pokok persoalan yang mereka ajukan, sekaligus mempersuasi warga untuk berpartisipasi menyumbangkan tanda tangan mereka untuk mendukung tuntutan yang telah dibuat. Peneliti berharap penelitian ini membawa manfaat: 1) memperluas penggunaan metode pembacaan teks-teks dunia maya menggunakan pendekatan semiotika sosial; 2) menambah kajian gerakan sosial di bidang lingkungan, terutama di ranah digital; dan 3) memberikan saran bagi aktivis dunia maya dalam membangun wacana dan tuntutan mereka.

Persoalan lingkungan yang ditemukan di seluruh dunia sangat beragam. Dalam

penelitian ini fokus persoalan lingkungan yang diambil adalah soal pelestarian hutan dan pembebasan hewan (*animal liberation*). Fokus tersebut diambil karena kelima fenomena petisi online yang dipilih menjadi objek kajian berkisar pada kedua persoalan lingkungan tersebut.

Penataan kawasan hutan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang sulit dan panjang bagi pemerintah. Menurut UU No. 41 tentang Kehutanan pasal 6 (2) pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Zulkarnain (2013) menyoroti perihal kekeliruan yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan kriteria kawasan hutan. Akibatnya, pengelolaan kawasan hutan tidak dilakukan sesuai dengan ekosistemnya.

Sementara itu Antono dkk. (2008) menyebutkan penyebab persoalan hutan yang terjadi hingga saat ini tidak lebih dari hukum dasar ekonomi, yaitu permintaan lahan cenderung selalu berkembang, sedangkan penawaran bersifat tetap. Keterbatasan lahan tersebut menjadi faktor perubahan penggunaan lahan hutan (deforestasi). Paling tidak permintaan terbesar ialah kebutuhan kayu, pengembangan areal pertanian, dan perluasan pemukiman.

Menilik persoalan yang disebutkan oleh kedua kelompok akademisi tersebut, dapat dipahami mengapa isu lingkungan relatif sering muncul dalam situs Change.org. Fokus persoalan yang lain ialah soal pembebasan binatang yang didasarkan pada gagasan binatang juga memiliki hak. Soal ini, Efendi (2015) mencatat gagasan hak hewan ini sudah dilontarkan oleh filsuf Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Gagasan tersebut berkembang hingga saat ini, meskipun tak lepas dari perdebatan yang muncul di kalangan pemikir.

Graham (2014) dalam Efendi (2015) menuliskan perdebatan antara kedua kubu yang bertentangan. Bagi penganut

libertarian, hewan memiliki hak negatif, bukan hak positif. Hak tersebut antara lain adalah hak dibiarkan sendiri dan hak untuk tidak dibunuh atau tidak diburu, sedangkan kelompok yang menolak hak hewan berprinsip bahwa hewan bukanlah kelompok dari "*the moral community*". Mereka memandang hewan tidak punya perasaan menyesal atau meminta maaf ketika berada dalam kelompok. Singkatnya, hewan bukanlah agen moral. Atas dasar itulah secara moral tidak bisa dikatakan hewan memiliki hak.

Pandangan-pandangan tersebut kiranya memengaruhi gerakan sosial yang dilakukan para aktivis pembebasan hewan—atau orang awal yang berempati terhadap kondisi hewan. Pada objek kajian yang diteliti terdapat tiga kasus mengenai hewan, di antaranya hiu dan gajah. Hal tersebut menunjukkan, di Indonesia juga ada gejala yang menunjukkan kegelisahan yang serupa.

Untuk meneliti kelima petisi persoalan lingkungan di Change.org, peneliti menggunakan tiga pendekatan. Pertama, tulisan ini mengelaborasi gerakan sosial secara umum. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat modern memiliki ciri tema dan strategi tertentu yang berbeda pada era sebelumnya. Kedua, dipaparkan kajian mengenai petisi, termasuk sejarah dan maksud filosofis di baliknya. Terakhir, ketiga, disebutkan fenomena petisi online yang jamak ditemui di era informasi seperti ini.

Istilah gerakan sosial (*social movement*) memiliki definisi yang beragam. Para ilmuwan sosial mendefinisikan istilah ini sesuai dengan latar belakang keilmuan yang mereka tekuni (Donk et al., 2004). Misalnya, ilmuwan politik melihat gerakan sosial dalam hubungannya dengan kekuasaan, sementara ilmuwan sosiologi melihatnya sebagai resistensi kelembagaan. Selain itu, faktor perbedaan kurun waktu pengkajian juga menimbulkan keberagaman. Konteks politik, ekonomi, gaya hidup, serta kesadaran mengenai identitas politik suatu masyarakat

tentu berbeda dari masa ke masa.

Ditilik dari sejarahnya, Christiansen (2011) mencatat bahwa gerakan sosial baru disadari pada tahun 1700an, bersamaan dengan bangkitnya ideologi demokrasi di negara-negara barat. Seiring berjalannya waktu, gerakan sosial tidak lagi identik dengan proses demokrasi, karena tercatat terjadi pula pada negara yang cenderung menganut jenis pemerintahan yang otoriter. Akibatnya, gerakan sosial berkembang berbeda-beda dalam bentuk, tujuan, maupun ideologinya sesuai dengan realitas politik di mana mereka berada. Kendati demikian beragam, ada satu tren yang sama pada setiap gerakan sosial, yakni penggunaan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan.

Komunikasi, dan perangkat teknologi yang menjadi salurannya, memiliki peranan penting dalam kajian perkembangan gerakan sosial. Donk et al. (2004) menyebut komunikasi sebagai alat untuk memobilisasi sumber daya. Melalui komunikasi, para aktivis gerakan sosial mengumpulkan sumber daya mereka yang tidak hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki pemikiran dan nasib sama, tetapi termasuk dana, komitmen, dan pengetahuan.

Breindl (2010) menegaskan internet memfasilitasi kecepatan dari interaksi, menekan harga dari sebuah tindakan partisipasi, sekaligus memperluas jangkauan pesan yang disampaikan. Berkaitan dengan gerakan sosial, dia juga menganggap internet sebagai alat gerakan. Aksi-aksi kolektif menjadi lebih mudah untuk diinisiasi.

Selain itu, internet juga berfungsi sebagai fasilitator dari sebuah gerakan. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari aktivitas lembaga-lembaga terkait. Misalnya, aktivitas menulis surat, membuat kampanye, hingga mengumpulkan donasi, memang tetap bisa dilakukan tanpa menggunakan teknologi terkini, tetapi dengan teknologi tersebut pekerjaan akan semakin mudah. Dalam konteks tulisan ini, teknologi memiliki peran

utama dalam petisi *online*.

Menilik Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online* (kbbi.kemendikbud.go.id) petisi diartikan sebagai permohonan resmi kepada pemerintah. Pada awalnya, petisi di Indonesia memang erat kaitannya dengan politik. Sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya 1936, dilayangkanlah “Petisi Soetardjo” kepada Ratu Wilhelmina dan parlemen di Belanda. Sementara pada tahun 1980 ada “Petisi 50” yang dilayangkan para tokoh politik kepada Presiden Soeharto. Mereka memprotes penggunaan filsafat Pancasila untuk menguasai lawan-lawan politiknya.

Kendati demikian, dilihat dari isu-isu petisi belakangan ini pada situs Change.org, tujuan petisi tidak hanya diberikan kepada pemerintah. Tetapi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam objek kajian dari tulisan ini, salah satu tujuan petisi adalah pengelola toko *online*.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir mengubah banyak sendi kehidupan manusia. Aktivitas petisi tak luput dari gelombang itu. Sebelum internet masuk di Indonesia, kegiatan penandatanganan petisi dilakukan secara luar jaringan (*luring/offline*). Artinya, para peserta penandatanganan membubuhkan tanda tangan mereka secara langsung pada dokumen kertas, kain, atau media lainnya, yang lalu dikirimkan kepada pihak-pihak yang mereka tuntut untuk melakukan perubahan. Dengan menggunakan internet, orang-orang tinggal duduk menghadap komputer atau gawai mereka lalu meng”klik” pilihan tertentu untuk menyatakan bahwa mereka menandatangani petisi tersebut. Tanda tangan digital itu lalu dikirimkan kepada alamat e-mail yang bersangkutan. Sebagian juga membagikan informasi tersebut melalui akun-akun jejaring sosial yang dimiliki.

Riset di Australia menunjukkan

kepercayaan yang kuat dimiliki oleh warga terhadap aksi secara online (Lean & Fuller, 2016). Mereka meneliti motivasi dan kepentingan orang-orang yang berpartisipasi dalam aksi perubahan lingkungan. Hal penting yang didapatkan dari survei tersebut ialah diperlukannya kesadaran sebagai aktivis ketika berpartisipasi dalam gerakan sosial, bahkan secara *online* sekalipun. Kesadaran tersebut mensyaratkan adanya pemenuhan informasi yang terang, tidak bias oleh kepentingan media, dan komplit. Pasalnya, seringkali warga tidak menyadari bahwa aksi mereka dalam aktivisme *online* memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan hal-hal politik (pengambilan keputusan) khususnya dalam persoalan-persoalan lingkungan.

Ditilik dari persepektif yang lebih luas, kehadiran internet menyediakan alternatif perubahan bentuk gerakan sosial secara keseluruhan. Gerakan sosial ini tidak terbatas pada aksi perlawanan yang cenderung keras atau penandatanganan petisi yang digolongkan lembut. Itulah sebabnya Laer & Aelst (2010) berpendapat penggunaan saluran internet adalah faktor yang menentukan alternatif bentuk gerakan sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada matriks berikut.

	Internet supported	Internet based
High threshold	More violent action/ destruction of property Sit in/ occupation Transnational demonstration/ meeting	Hacktivism Culture jamming Protest website/ alternative media
Low threshold	Legal demonstration Consumer behavior Donate money	Email bomb/ virtual sit-in Online petition

Gambar 1. Matriks Gerakan Sosial (Laer & Aelst, 2010)

Matriks tersebut mengategorikan bentuk-bentuk aktivitas gerakan sosial melalui dua pembeda, yaitu dukungan internet dan tinggi rendahnya ambang gerakan. Petisi online dengan demikian masuk dalam kotak nomor 3. Kotak tersebut mengungkapkan tingkat ambang gerakan yang rendah dengan menggunakan dukungan internet. Bentuk yang berada pada kotak yang sama adalah *e-mail bomb* atau *virtual sit-in*. Dalam objek studi tulisan ini, aktivitas *e-mail bombing* dilakukan setelah tanda tangan terkumpul, tetapi peneliti belum pernah menemukan aksi *virtual sit-in*.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan memilih terlebih dahulu objek studi berupa petisi yang diklaim berhasil oleh pembuat petisi melalui Change.org. Indikator keberhasilan yang dimaksud relatif sederhana, yaitu pihak yang dipetisikan melakukan apa yang dikehendaki oleh pembuat petisi. Sejak Change.org Indonesia berdiri tahun 2012, peneliti mencatat ada 15 petisi yang terkait dengan isu lingkungan.

Dari jumlah tersebut, ditemukan lima petisi yang diklaim berhasil. Petisi-petisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Muhamad Arie—Lepaskan Penyu dan Hiunya, Sekarang ! (2016; 4.863 tanda tangan);
- 2) Yayasan Scorpion Indonesia—Lepas Belunggu Gajah di Kebun Binatang Surabaya (2016; 4.816 tanda tangan);
- 3) Wisnu Wardana—#RIPYongki Hentikan Penjualan Produk yang Terbuat dari Gading Gajah di Toko Online (2015; 28.408 tanda tangan);
- 4) Glenn Fredly—Pak @SBYudhoyono Pak @Zul_Hasan : Batalkan Izin Penebangan Hutan Kepulauan Aru (2014; 15.088 tanda tangan);
- 5) Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi—Walikota Bandung, Batalkan IMB PT. EGI

atas Hutan Kota Babakan Siliwangi (2013; 8.006 tanda tangan) [lebih jelas lihat pada Tabel 2].

Kelima objek studi tersebut diteliti menggunakan metode analisis semiotika sosial yang digagas M.A.K. Halliday (Santoso, 2008). Pendekatan ini merupakan turunan dari teori analisis wacana yang tidak hanya mengamati soal naskah sintagmatik, tetapi juga naskah paradigmatik.

Semiotika sosial membantu peneliti untuk membedah teks dengan menggunakan tiga komponen konteks situasi. Santoso (2008) memandang konteks situasi sebagai keseluruhan lingkungan tempat teks beroperasi. Konteks situasi tersebut terdiri dari tiga unsur: Medan Wacana (*field of discourse*), Pelibat Wacana (*tenor of discourse*), dan Sarana Wacana (*mode of discourse*). Halliday (1978) memandang perlunya peneliti untuk melihat bahasa sebagai sebuah produk sosial dan kultural. Dengan kata lain, situasi di sekitar bahasa itulah yang membentuk sebuah teks.

Pada bagian medan wacana, peneliti menyorot gagasan besar yang diangkat oleh pembuat petisi. Gagasan tersebut lalu dikaitkan dengan konteks sosial yang berada di balik gagasan tersebut. Peneliti mengaitkannya dengan data dan kronologi kasus yang membuat gagasan tersebut muncul dan dapat dipahami.

Pada bagian pelibat wacana, peneliti melakukan penelusuran secara online mengenai identitas dari pembuat petisi. Selain itu peneliti juga melihat relevansi antara identitas yang disebut dalam teks dengan isu yang diangkat oleh pembuat petisi.

Pada bagian sarana wacana, peneliti mengidentifikasi pilihan-pilihan kata yang digunakan pembuat petisi lalu memaknainya. Sebagaimana disebut dalam Santoso (2008) hal yang diperhatikan dari sarana wacana adalah peran bahasa, tipe interaksi, medium, saluran, dan modus retorik.

Ketiga unsur tersebut digunakan

untuk membedah lima teks yang merupakan tuntutan petisi dari pihak aktivis. Paling tidak peneliti menggunakan dua tahap analisis. Pertama, peneliti mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam pengantar petisi. Lalu, kedua, bahasa tersebut lalu dimaknai dengan mengaitkannya dengan konteks yang berada di balik isu tersebut. Peneliti menilik konteks tersebut berdasarkan berita yang beredar di media online arus utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti mengelaborasi pembacaan atas lima petisi yang menjadi objek studi. Tiga analisis konteks situasi akan dijabarkan pada setiap petisi.

Petisi 1. Guna menganalisis medan wacana, peneliti memerhatikan kalimat-kalimat berikut:

(1) *“penangkaran” hiu ini justru seperti “penjara” bagi 5 hiu plus 1 penyu dewasa yang dikurung dalam jaring di tengah laut.*

(2) *Kami pikir mereka adalah satwa yang dilindungi, dan jual beli satwa ini bukankah ilegal? Mengapa mempertahankan 1 penyu dewasa dan 5 hiu seukuran lengan di jaring? Hanya untuk pertunjukan?*

(3) *Saya harap Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi bisa meninjau lokasi ini dan segera mengambil tindakan yang tepat untuk membebaskan satwa tersebut ke laut lepas!*

Dari ketiga kalimat tersebut, ide pokok yang diajukan adalah bagaimana seharusnya perlakuan manusia terhadap hiu dan penyu sebagai hewan yang dianggap dilindungi bagi pembuat petisi. Pengetahuan tersebut selaras dengan apa yang diinformasikan oleh organisasi lingkungan WWF. Mereka memprediksi 55 tahun lagi, terhitung sejak tahun 2013, hiu terancam punah (www.wwf.or.id). Populasi hiu saat ini turun dengan drastis dengan data hampir tiga hiu mati setiap detik.

Kendati demikian, persoalan utamanya adalah ikan tersebut diburu untuk siripnya dikonsumsi, bukan terletak pada penangkaran atau penjualan ilegal. Bahkan, WWF cenderung mendukung hiu untuk dijadikan objek wisata menyelam dengan pendekatan ekonomis. Berikut gambar yang dicantumkan dalam situs resmi:



Gambar 2. Perbandingan Nilai Hiu. (Sumber: www.wwf.or.id)

Kendati terkesan mendukung, organisasi ini memasukkan semacam syarat pemanfaatan hewan untuk kepentingan wisata, yaitu dengan memerhitungkan kelestarian hewan tersebut. Upaya kelestarian itu dilakukan dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan data lengkap mengenai populasi, biologi, dan ekologi dari hiu. Untuk itu, kerja sama antarpihak terkait perlu dijalin dengan serius.

Pada konteks situasi pelibatan wacana, peneliti mengidentifikasi ada empat tokoh yang disebutkan dalam teks pengantar petisi. Keempat tokoh tersebut adalah 1) wisatawan biasa; 2) penjaga rumah apung; 3) penjaga pantai; dan 4) Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi.

Pembuat petisi memperkenalkan diri sebagai “wisatawan biasa” pada awal tulisan pengantar petisi online. Penggunaan kata tersebut menandakan bahwa dia bukan individu yang berasal dari organisasi pecinta hewan atau bahkan pemangku kebijakan. Istilah tersebut bukannya menurunkan legitimasi, tetapi justru menguatkan pesan bahwa kepedulian untuk memunculkan gerakan sosial ini bisa diawali oleh semua pihak, termasuk “wisatawan biasa” yang

dianggap punya kepentingan yang relatif rendah terhadap isu keberlanjutan populasi hiu dan penyu.

Dua tokoh berikutnya yaitu “penjaga rumah apung” dan “penjaga pantai” digunakan sebagai saksi sekaligus pelaku dari “pemenjaraan” hiu dan penyu demi kepentingan wisata di Banyuwangi. Tanggapan mereka atas pertanyaan pembuat petisi juga dikutip untuk membangun kekuatan cerita. Keputusan untuk tidak akan melepaskan hiu demi kepentingan wisata bukan menandakan kepedulian untuk menjaga populasi, tetapi lebih kepada ketidakpedulian warga akan persoalan itu sendiri.

Tokoh terakhir ialah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyuwangi. Tokoh ini adalah institusi yang dianggap memiliki wewenang untuk melakukan perubahan nasib hiu di tempat tersebut. Karena tugasnya itu, BLH juga menjadi sasaran tuntutan melalui petisi online tersebut.

Komponen sarana wacana pada petisi ini dapat ditemukan pada data berikut:

- (1) “penjara”
- (2) *Gak akan dilepas, wong buat wisata.*
- (3) *Beli, satu hiunya 3 juta*”
- (4) *penyu yang menggigiti jaring berusaha kabur ke laut lepas, dan melihat hiu-hiu mondar-mandir dalam jaring yang sempit*

Penggunaan kata “penjara” menggambarkan kondisi hiu dan penyu yang berada dalam jaring tersebut menunjukkan makna konotasi. Makna yang dapat diberikan atas kata itu adalah negasi dari kebebasan. Hal tersebut berseberangan dengan kodrat hidup hiu yang adalah predator puncak di ekosistem laut. Sebagai predator, manfaat yang dia berikan bagi ekosistem adalah mengendalikan populasi ikan yang menjadi makanannya.

Pada kalimat kedua ditekankan alasan mengapa kedua jenis hewan itu tak akan dilepaskan kembali ke laut, yaitu untuk kepentingan wisata. Berdasarkan data WWF di atas, pemasukan yang bisa didapatkan dari

wisata ini mencapai Rp1,8 miliar pertahun. Berkaitan dengan kalimat tiga yang bicara soal harga pembelian ikan seharga Rp3 juta, maka jumlah itu adalah modal yang relatif kecil jika dianggap sebagai investasi. Artinya, kepentingan ekonomi dan kesejahteraan pelaku bisnis di balik “pemenjaraan” tersebut adalah wacana yang dimenangkan bila dibandingkan dengan keseimbangan ekosistem lautan.

Petisi 2. Guna menganalisis konteks situasi medan wacana, peneliti mengidentifikasi kalimat-kalimat berikut:

- (1) *Seekor gajah di Kebun Binatang Surabaya dalam keadaan terikat rantai di kedua kakinya.*
- (2) *Gerak gajah sangat terbatas dan tidak memiliki akses terhadap makanan dan air. Kandang gajah terlihat sangat kotor dipenuhi feses.*
- (3) *Gajah juga menunjukkan gejala zoonosis, yaitu perilaku menyimpang karena stres dalam penjara atau kurungan*
- (4) *prinsip kesejahteraan satwa di lembaga konservasi*

Dari keempat kalimat tersebut, peneliti mengambil ide utamanya, yaitu protes atas pemeliharaan gajah di kebun binatang. Pembuat petisi melihat pengelola Kebun Binatang Surabaya memperlakukan kehidupan gajah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan. Perlakuan itu membuat gajah menderita dan terancam mati. Ditilik dari konteksnya, kejadian gajah mati di kebun binatang bukanlah hal yang tak pernah terjadi.

Redaksi *National Geographic* versi online memberitakan seekor Gajah Sumatera yang mati di Kebun Binatang Bandung (12/5/2016). Kematian gajah yang setelah seminggu sebelumnya lumpuh itu dipandang sebagai cermin buruknya tata kelola kebun binatang di Indonesia. Sementara ditilik secara umum, populasi gajah Sumatra tinggal 1.328 ekor.

Redaksi *Media Indonesia* versi online mencatat pemerintah melakukan berbagai

program untuk meningkatkan populasi gajah di Indonesia (24/1/2017). Senada, Sukmantoro (2017) dalam ulasannya di situs WWF menyebut penurunan populasi gajah sudah berada dalam posisi memprihatinkan. Salah satu penyeimbang angka kematian gajah adalah angka kelahiran gajah eks-situ (sudah tidak tinggal di habitatnya) yang ditemukan di kebun binatang, pusat pelatihan gajah, dan sebagainya. Berangkat dari gagasan tersebut, Kebun Binatang adalah harapan. Maka ketidakberesan dalam pengelolaan gajah adalah sebuah hal yang patut dituntut untuk diperbaiki.

Gerakan semacam ini sebenarnya sudah mulai diwacanakan di Eropa sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu. Singer (1985) telah menuliskan soal gerakan pembebasan hewan (*animal liberation*) dari sisi etisnya. Dia menggunakan istilah "*species-selfishness*" untuk menyebut perlakuan manusia yang semena-mena terhadap hewan. Menurutnya, salah satu alasan kuat atas perlakuan tersebut adalah manusia percaya pada mitos (berkaitan dengan narasi penciptaan) yang membuat mereka merasa superior dan berkuasa. Kendati demikian, gerakan ini tidak bertujuan menyetarakan posisi manusia dan hewan, tetapi menyadarkan bahwa kita sama-sama memiliki satu kepentingan (*interest*) yaitu bertahan hidup dengan menghindari kesakitan-kesakitan secara fisik.

Sedangkan pada konteks situasi pelibat wacana, peneliti mengidentifikasi ada tiga tokoh yang disebutkan dalam teks, yaitu 1) relawan dari Scorpion Wildlife Trade Monitoring group; 2) (pengelola) Kebun binatang Surabaya; dan 3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Pembuat petisi mencantumkan kelompoknya sebagai salah satu tokoh yang diangkat dalam teks, yaitu Yayasan Scorpion Indonesia. Pada situs resminya dapat diketahui bahwa yayasan ini punya visi mengatasi perdagangan satwa liar ilegal di

Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut mereka secara rutin melakukan aksi tuntutan kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi-aksi perdagangan satwa yang terjadi di Indonesia.



Gambar 3. Infografis Populasi Gajah Sumatera (Sumber: www.forkas.stis.ac.id)

Selain aksi turun langsung ke lapangan, mereka juga secara rutin menuliskan laporan-laporan dalam situs resmi mereka. Dalam laporan tersebut mereka mengajak masyarakat untuk melakukan pengiriman email secara bersama-sama (*e-mail bombing*) ke alamat-email yang dimiliki pihak terkait.

Tokoh pengelola Kebun Binatang Surabaya adalah tokoh yang dianggap perlu bertanggungjawab atas kondisi mengenaskan yang dialami oleh gajah. Kasus ketidakberesan dalam pengelolaan memang sudah lama terjadi pada kebun binatang ini. Redaksi Tempo.co (8/1/2014) bahkan menjulukinya dengan "Kebun Binatang Terkejam di Dunia" lantaran banyak sekali hewan yang mati karena salah urus.

Tokoh yang disebutkan berikutnya dalam teks adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sebagai

lembaga eksekutif, kementerian berhak dan wajib melakukan tindakan atas persoalan yang terjadi di bawah koordinasinya. Untuk informasi, saat ini Kebun Binatang Surabaya sudah berada di bawah Pemerintah Kota, sebelumnya kebun binatang tersebut dimiliki dan dikelola oleh swasta.

Komponen sarana wacana pada petisi 2 dapat ditemukan pada dua data berikut:

- (1) *stres dalam penjara atau kurungan*
- (2) *Hampir seratus hewan telah mati dalam waktu kurang dari 12 bulan*

Teks pertama tersebut digunakan untuk menjelaskan gejala *zoochosis* yang dialami oleh gajah. Kandang yang idealnya memenuhi standar-standar layak bagi hidup gajah dituliskan sebagai “penjara” atau “kurungan” yang diasosiasikan sebagai tempat yang buruk untuk kehidupan satwa liar.

Teks kedua adalah data yang digunakan untuk menguatkan tuduhan bahwa terdapat praktik salah kelola di kebun binatang tersebut. Kematian hampir seratus hewan dalam waktu singkat adalah akibat dari salah kelola tersebut. Penggunaan angka juga digunakan oleh para pembuat petisi lain untuk meyakinkan warga mengenai urgensi dari persoalan yang mereka angkat.

Petisi 3. Guna menganalisis konteks situasi medan wacana, peneliti mengidentifikasi kalimat-kalimat berikut:

- (1) *Pembunuh sadis telah mengambil paksa gadingnya.*
- (2) *produk gading gajah, yang jelas-jelas ilegal, dijual di toko-toko online*
- (3) *mencantumkan secara tertulis dalam kebijakannya untuk tidak mengizinkan penjualan produk-produk yang berasal dari semua satwa dilindungi, termasuk gading gajah*

Peneliti mengambil dua ide besar yang digunakan oleh pembuat petisi. Pertama, soal kekejian para pemburu gading gajah. Dalam laporannya, redaksi BBC mencatat selama kurun waktu 2012 hingga

2014 sudah ada 38 ekor gajah mati diracun di Riau. Sebagian besar gajah tersebut ditemukan dalam kondisi tidak ada gadingnya. Dalam laporan yang sama, WWF mengingatkan kepada pemerintah bahwa jika hal ini dibiarkan terjadi, gajah Sumatra akan punah dalam waktu 30 tahun.

Ide kedua adalah mengenai adanya produk-produk yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di tiga toko *online* besar di Indonesia. Ketiganya dilaporkan memberikan respons positif atas tuntutan tersebut dengan cara mengabulkannya. Sejak petisi ini muncul dan viral di benak warga, ketiganya lalu memutuskan untuk menghapus penjualan produk ilegal tersebut. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi dunia perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.

Sedangkan pada konteks situasi pelibat wacana, peneliti mengidentifikasi ada dua tokoh yang disebutkan dalam teks melalui teks berikut:

- (1) *Saya Wisnu Wardana, saya seorang dokter hewan. Saya kerap diminta membantu autopsi gajah yang mati*
- (2) *pengelola toko online besar di Indonesia seperti Lazada.co.id, bukalapak.com dan Tokopedia.com*

Penyebutan identitas pribadi berupa nama lengkap berikut dengan pekerjaannya tidak banyak ditemukan pada petisi lain. Bahasa yang digunakan dalam petisi ini dapat dimaknai dengan kuat lantaran status pekerjaan yang relevan dengan isi dari petisi tersebut. Pembuat petisi adalah saksi dari kekejian yang dilakukan oleh pemburu kepada gajah.

Sedangkan tiga toko online yang disebutkan dilabeli sebagai “toko online besar di Indonesia.” Redaksi Kontan melaporkan transaksi Bukalapak.com pada tahun 2016 mencapai sepuluh triliun rupiah. Pada tahun yang sama, Tokopedia mengklaim jumlah transaksi mereka satu triliun rupiah setiap bulannya. Sementara Lazada mencapai Rp13 triliun pada tahun

2015. Data-data publik tersebut menguatkan label yang diberikan, bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat melalui tiga toko online tersebut memang besar dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, menjadi tepat ketika pembuat petisi menuntut mereka untuk menghentikan penjualan ilegal produk yang terbuat dari gading gajah.

Komponen sarana wacana pada petisi 3 dapat ditemukan pada data berikut:

- (1) *tewas dengan lidah membiru dan gading dicabut paksa;*
- (2) *sobekan besar dibagian pipi hingga rahang kiri dan kanan gajah malang itu;*
- (3) *mengindari gajah dari pembunuhan keji.*

Peneliti memaknai hal yang sama pada potongan kalimat satu dan dua, yaitu pembuat petisi hendak mendeskripsikan bagaimana kondisi gajah ketika ditemukan. Deskripsi tersebut dituliskan dengan penggunaan diksi yang tepat dan terperinci untuk menguatkan kesan keji yang beberapa kali dituliskannya. Ini adalah contoh strategi retorika yang untuk membujuk warga supaya berpartisipasi dalam petisi yang dibuat.

Frasa “dicabut paksa” digunakan untuk menjelaskan cara pemburu mengambil gading gajah. Sementara label “malang” yang diletakkan di belakang kata gajah menunjukkan empati yang dimiliki oleh pembuat petisi atas kekejian yang dialami oleh gajah.

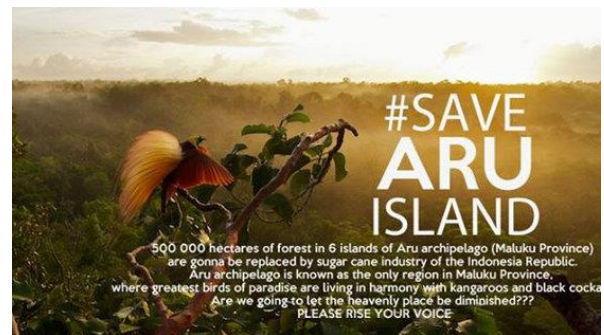
Sementara makna yang diletakkan pada potongan kalimat tiga adalah kondisi yang akan terjadi ketika petisi dimenangkan. Kekejian yang tadinya diceritakan pada potongan kalimat satu dan dua tidak akan terjadi lagi pada gajah-gajah lain.

Petisi 4. Guna menganalisis konteks situasi medan wacana, peneliti mengidentifikasi kalimat-kalimat berikut:

- (1) *500 ribu hektar hutan leluhur saya di Maluku mau dibabat massal!*
- (2) *Lalu, apa yang tersisa dari Maluku, jika kekayaan tersisa berupa bentangan hutan lebat, tempat bermainnya unggas*

Cendrawasih ini dibabat massal?

Kedua kalimat tersebut mengarah pada satu ide yang sama, yaitu soal penebangan hutan. Penebangan hutan, dengan berbagai alasan dan kepentingan, adalah sebuah isu lingkungan yang besar di Indonesia. Pada tahun 2000 hingga 2012 VOA Indonesia melaporkan Indonesia telah kehilangan 15,79 juta hektar hutan, dimana 6,02 juta hektar diantaranya adalah hutan primer.



Gambar 4. Poster Kampanye Selamatkan Hutan di Kepulauan Aru. (Sumber: www.change.org)

Data tersebut menunjukkan angka yang mencerminkan urgensi persoalan. Pasalnya, keberadaan hutan memengaruhi kualitas kehidupan makhluk hidup secara keseluruhan, tidak hanya manusia saja. Selain kualitas air yang merosot, konflik ruang antara manusia dengan satwa liar semakin sering mengancam eksistensi satu sama lain.

Pada konteks situasi pelibat wacana, peneliti mengidentifikasi ada empat tokoh yang disebutkan dalam teks, yaitu 1) Menteri Kehutanan; 2) Jacky Manuputty; 3) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku; dan 4) KOMNAS HAM Maluku.

Serupa dengan petisi 2, petisi 4 ini memasukkan nama kementerian sebagai tokoh yang didorong untuk mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Untuk informasi, petisi ini dibuat tahun 2014 (kabinet di bawah pimpinan Presiden SBY) di mana Kementerian Kehutanan masih berdiri sendiri. Saat laporan ini ditulis, nama kementerian diubah menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di bawah pimpinan

Presiden Joko Widodo. Diambil dari situs resminya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memiliki 24 peraturan yang dikeluarkan menteri sebagai dasar dari tindakan yang mereka lakukan.

Tokoh kedua barangkali tidak memiliki popularitas yang sama dengan pembuat petisi: Glen Fredly. Kendati demikian, Jacky Manuputty adalah tokoh besar aktivis di Maluku. Dia seorang pendeta gereja yang secara konsisten menyuarakan upaya-upaya perdamaian. Karena prestasinya tersebut, dia diganjar berbagai macam penghargaan baik dari nasional maupun internasional. Redaksi CNN menjulukinya sebagai “Provokator Perdamaian dari Ambon” atas upaya-upaya perdamaian yang selama ini dia lakukan.

Petisi ini dibuat oleh Glen Fredly, musisi asli Maluku yang populer di Indonesia. Pencantuman kata Jacky Manuputty dibaca sebagai strategi supaya perjuangan ini relevan dengan apa yang selama ini dilakukan. Jadi masing-masing tokoh memiliki fungsinya: Jacky sebagai aktivis Maluku yang konsisten, sedangkan Glen adalah tokoh populer yang dianggap bisa menarik banyak dukungan dari warganet di luar Maluku.

Dua institusi yang disebut dalam teks, AMAN Maluku dan Komnas HAM Maluku, adalah institusi yang mendukung tuntutan warga Maluku tersebut. Bagaimanapun, dukungan institusi tetap dibutuhkan karena yang dihadapi adalah perusahaan, bukan perorangan.

Komponen sarana wacana pada petisi 4 dapat ditemukan pada data berikut:

- (1) *500 ribu hektar hutan leluhur saya di Maluku mau dibabat massal!;*
- (2) *Lalu, apa yang tersisa dari Maluku, jika kekayaan tersisa berupa bentangan hutan lebat, tempat bermainnya unggas Cendrawasih ini dibabat massal?;*
- (3) *Beta Glenn Fredly @GlennFredly & Jacky Manuputty @jmanuputty.*

Pada kalimat pertama peneliti mengidentifikasi dua hal penting, yaitu “500

ribu hektar” dan “leluhur saya”. Penggunaan angka yang besar pada teks tersebut untuk menguatkan kesan bahwa pembabatan hutan ini bukan perkara kecil. Sementara itu, kata leluhur digunakan pembuat petisi untuk menunjukkan perasaan turut memiliki hutan tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk meyakinkan bahwa dirinya cukup kredibel untuk mengajukan petisi ini adalah pendekatan kultural-emosional.

Kalimat kedua menunjukkan konsekuensi yang akan terjadi ketika hutan dihabisi. Secara retorik dia meyakinkan bahwa kekayaan Maluku hanyalah hutan lebat dan burung Cendrawasih. Dengan demikian, pembabatan hutan adalah pemiskinan Maluku.

Identitas pembuat petisi dan aktivis Maluku dicantumkan untuk menarik partisipasi. Sedangkan kata “beta” digunakan sebagai kata ganti orang pertama untuk menunjukkan identitas. Bahwa yang bergerak untuk menyelamatkan Maluku tak lain adalah orang Maluku itu sendiri.

Petisi 5. Guna menganalisis konteks situasi medan wacana, peneliti mengidentifikasi kalimat-kalimat berikut:

- (1) *"Selamatkan Hutan Kota Dunia dari Ancaman Komersialiasi!";*
- (2) *membayangi kelestarian lingkungan hayati Kota Kembang;*
- (3) *kerugian minimalnya mencapai Rp. 8,5 miliar per tahun;*
- (4) *Hutan kota itu dikhawatirkan akan semakin berkurang luasnya dan beralih fungsinya.*

Satu ide besar yang digagas oleh pembuat petisi adalah penolakan alih fungsi hutan. Suwarno (2017) mencatat alih fungsi hutan sudah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Sebagai konsekuensi dari kemunculan industri, hutan saat itu dibabat habis lalu ditanami tanaman industri seperti teh, kopi, kakao, dan lain-lain. Dalam konteks ini, industri masih menjadi penyebab dari rencana alih fungsi hutan tersebut. Bedanya, kali ini tidak untuk ditanami

tanaman industri, tetapi untuk dibangun hotel dan restoran untuk kepentingan wisata. Secara umum, alih fungsi hutan dianggap sebagai pemicu terjadinya banjir, longsor, kekeringan, dan penurunan kualitas udara di suatu daerah.

Sedangkan pada konteks situasi pelibat wacana, peneliti mengidentifikasi ada tiga tokoh yang disebutkan dalam teks, yaitu 1) Pemerintah Kota Bandung; 2) PT Esa Gemilang Indah (EGI); dan 3) Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi.

Pemerintah Kota Bandung adalah tokoh yang dikenai tuntutan. Pembuat petisi mendesak pemerintah untuk membatalkan kontrak PT Esa Gemilang Indah (EGI) untuk melakukan alih fungsi hutan lindung di hutan kota tersebut.

Sedangkan pembuat petisi ini adalah Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi (FWPBS). Mereka dikenal sebagai forum militan yang berisikan aktivis lingkungan, budayawan, dan seniman di Bandung. Forum ini melakukan gerakan dengan menggalang dukungan melalui petisi online maupun aksi turun ke lapangan langsung. Dilaporkan dalam Tempo.co, FWPBS (20/5/2013) melakukan aksi pencopotan pembatas area komersialisasi dan dilanjutkan dengan *longmarch* sepanjang 3 kilometer ke Kantor Pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4. Spanduk Penolakan Warga
Sumber: www.merdeka.com

Komponen sarana wacana pada petisi 5 dapat ditemukan pada data berikut:

- (1) *Ancaman mengerikan sedang bergentayangan*;
- (2) *"hutan kota dunia"*;
- (3) *"green belt"*;

(4) *lahan Babakan Siliwangi seluas 3,8 hektar dalam sehari mampu menghasilkan oksigen senilai Rp. 117 juta. Bila dihitung dalam setahun, Babakan Siliwangi menghasilkan oksigen senilai Rp. 42,7 miliar. Artinya jika 20 persen lahan di Babakan Siliwangi dijadikan bangunan, maka kerugian minimalnya mencapai Rp. 8,5 miliar per tahun. Secara ekonomi, tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang akan diterima dari PT EGI selama 20 tahun sebesar Rp. 7 milyar atau setiap tahun sekitar Rp. 350 juta.*

Pada potongan kalimat pertama pembuat petisi menggunakan kata-kata bermajas hiperbola. Kata kerja "bergentayangan" biasanya diletakkan pada subjek hantu. Pada umumnya orang takut pada hantu, maka hal tersebut digunakan untuk memunculkan ketakutan di benak warga bila alih fungsi hutan kota tersebut betul terjadi.

Kendati menggunakan pendekatan emosional di awal teks, pembuat petisi juga memasukkan unsur data yang sangat kaya dan penuh perhitungan pada contoh kutipan 4. Mereka menggunakan pendekatan ekonomi untuk menghitung berapa kerugian yang akan menjangkiti warga Bandung ketika fungsi hutan kota tersebut beralih menjadi restoran. Peneliti memandang pendekatan ekonomi memang merupakan pendekatan yang efektif karena dapat dihitung dengan jelas dan relatif sederhana untuk dapat dipahami warga secara umum.

Sedangkan contoh teks 2 dan 3 adalah istilah untuk menguatkan bahwa hutan Babakan Siliwangi adalah kawasan yang berharga bagi sebuah ekosistem kota. "Green belt" yang diterjemahkan menjadi "sabuk hijau" merupakan kawasan yang mendapatkan manfaat dari tanaman yang berada di sana. Rahayu dkk. (2016) mengidentifikasi salah satu bentuk dari sabuk hijau adalah pohon. Dalam pandangan tersebut, salah satu fungsi dari pohon adalah menghalangi jatuhnya air hujan sehingga

mengurangi erosi dengan menghambat aliran permukaan. Dalam konteks ini, pembuat petisi melihat fungsi yang lain dari sabuk hijau, yaitu sebagai penghasil oksigen.

PENUTUP

Dari ketiga analisis konteks situasi tersebut peneliti memandang bahwa kekuatan sebuah wacana yang terdapat dalam aktivisme digital tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, identitas dan relevansi dari pembuat wacana. Kedua, urgensi isu lingkungan yang dijadikan topik petisi online.

Dalam isu identitas pembuat wacana, warga diajak untuk melihat relevansi antara isu dengan identitas pembuatnya. Relasi yang relevan tersebut bisa jadi terletak pada bidang pekerjaan yang dimiliki oleh pembuat petisi, seperti seorang dokter hewan yang mengajukan petisi menghentikan penjualan gading gajah. Selain pekerjaan, identitas juga bisa berarti kedekatan emosional dan pendekatan kultural seperti yang dicontohkan dalam petisi yang dibuat oleh Glen Fredly. Dalam konteks tulisan ini, unsur popularitas dikesampingkan karena tidak memberikan perbedaan yang signifikan dari jumlah tanda tangan yang menandakan dukungan atas tuntutan tersebut.

Urgensi atau tingkat kepentingan dari isu lingkungan tersebut juga memengaruhi kekuatan sebuah wacana lingkungan. Peneliti memandang penggunaan bahasa menjadi hal yang sangat penting untuk membangun wacana tersebut. Bahasa yang dimaksud bisa berupa penggunaan angka-angka yang bernilai relatif besar untuk mengalihkan isu lingkungan menjadi isu ekonomi sebagaimana dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Babakan Siliwangi. Selain itu, pemilihan kata (diksi) juga menjadi kekuatan persuasi yang diperhitungkan. Pemilihan kata-kata yang menunjukkan

kekejadian yang dilakukan seseorang dan penderitaan yang dialami oleh hewan tentu dimaksudkan untuk menyentuh aspek perasaan dan empati yang dimiliki oleh warga. Aspek tersebut tidak dapat diukur secara pasti, tetapi menjadi hal penting dalam mendorong partisipasi.

Isu digital dalam segala bentuk aktivitas manusia, terutama dalam komunikasi, masih menyisakan banyak hal untuk dieksplorasi menggunakan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini memiliki keterbatasan untuk menemukan relasi antara gerakan sosial yang bersifat digital ini dengan gerakan yang dilakukan di lapangan secara langsung.

Sebagaimana ditulis Breindl (2010), gerakan sosial online bagaimanapun tetap perlu dihubungkan dengan gerakan luar jaringan (*luring/offline*) yang dianggap tradisional. Maka penelitian selanjutnya yang menurut peneliti dapat dilakukan adalah dengan meneliti kedua metode gerakan sosial tersebut secara bersamaan. Penelitian dapat difokuskan baik kepada cara atau strateginya, maupun efek pada warga dan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon., *United Nation: Reports of The United Nation Conference On The Human Environment*. [Online] Available at: <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>, 1973. [Diakses 24 Maret 2017].
- Antoko, B. S., Sanudin, & Sukmana, A. "Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan Sumatera Utara". *Info Hutan*. V(4) (2008): 307-316,.
- Bervington, D. *The Rebirth of Environmentalism: Grassroots Activism from the Spotted Owl to the Polar Bear*. Washington: Island Press, 2009.
- Christiansen, J., *Narrative & Social Movements*. Dalam *Theories of Social Movements*. Pasadena: Salem Press, pp. 3-13, 2011.

- Donk, W. v. d., D.Loader, B., G.Nixon, P. & Rucht, D., *Introduction: Social Movement and ICTs*. Dalam *Cyberprotest: New Media, Citizens, and Social Movements*. London: Routledge, pp. 1-22, 2004.
- Efendi, A. "Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan, dan Praktik di Pengadilan". *RechtIdee Jurnal Hukum*. 10(2) (2015): 243-262.
- Khan, Z. A. "Global Environmental Issues and its Remedies". *International Journal of Sustainable Energy and Environment*. 1(8) (2013): 120-126.
- Halliday, M.A.K. *Language As Social Semiotic: The Social Interpretation Of Language And Meaning*. Edward Arnold, 1978.
- Laer, J. V. & Aelst, P. V. "Internet and Social Movement Action Repertoires". *Information, Communication & Society* 13(8) (2010): 1146-1171.
- Lean, J. e., & Fuller, S. "Action with(out) Activism: Understanding Ditigal Climate Change Action". *International Journal of Sociology and Social Policy*. 36(9/10) (2016): 578-595
- Porta, D. d. & Diani, M. *Social Movements: an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing, 2006.
- Rahayu, N.L.D. (dkk). "Pengaruh Vegetasi Kawasan Sabuk Hijau (Green Belt) Waduk Sermo Kulonprogo terhadap Kenampakan Hasil Proses Erosi dan Pemanfaatan oleh Masyarakat". *MGI*. 30(1) (2016): 76-87.
- Santoso, A. "Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Bahasa dan Seni*. 36(1) (2008): 1-14.
- Singer, P. "Ethics and the New Animal Liberation Movement"., *In Defense of Animals*, edited by P. S. (hal. 1-10). New York: Basil Blackwell, 1985.
- Zulkarnain. "Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan". *AGRIFOR XII*(2) (2013): 230-243,
- Ambon. [Online] <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20161123154822-454-174773/provokator-perdamaian-dari-ambon/>, 2016 [Diakses 11 Juni 2017]
- Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi, "Walikota Bandung, Batalkan IMB PT. EGI atas Hutan Kota Babakan Siliwangi". (<https://www.change.org/p/walikota-bandung-batalkan-imb-pt-egi-atas-hutan-kota-babakan-siliwangi>), 2016. [Diakses 31 Maret 2017]
- Glenn Fredly, Pak @SBYudhoyono Pak @Zul_Hasan : *Batalkan Izin Penebangan Hutan Kepulauan Aru* (<https://www.change.org/p/pak-sbyudhoyono-pak-zul-hasan-batalkan-izin-penebangan-hutan-kepulauan-ar>), 2014. [Diakses 31 Maret 2017]
- Jacobson, P., Mongabay. [Online] Available at: <https://news.mongabay.com/2016/06/how-is-indonesian-president-jokowi-doing-on-environmental-issues/>, 2016. [Diakses 21 Maret 2017].
- Kompas.com, *Change.org, Media Sosial untuk Perubahan Sosial*. [Online] (<http://tekno.kompas.com/read/2012/10/15/10090221/Change.org..Media.Sosial.untuk.Perubahan.Sosial>), 2012. [Diakses 24 April 2017]
- Kontan. *Nilai transaksi Bukalapak Rp 10 triliun di 2016* [Online] <http://m.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-bukalapak-rp-10-triliun-di-2016>, 2017 [Diakses 10 Juni 2017]
- Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 [Online] <http://www.menlhk.go.id/berita-85-kumpulan-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-tahun-2016.html> [Diakses 11 Juni 2017]
- Media Indonesia. *Populasi Gajah di Indonesia 'Tinggal' 1.328 Ekor* [Online] <http://mediaindonesia.com/news/read/89074/populasi-gajah-di-indonesia-tinggal-1-328-ekor/2017-01-24>, 2017 [Diakses 10 Juni 2017]
- Muhamad Arie, *Lepaskan Penyus dan Hiunya, Sekarang!* (<https://www.change.org/p/dinas-pariwisata-banyuwangi-lepaskan-penyus>

Media Online

- BBC Indonesia. "Lagi, Gajah Mati di Riau Ditemukan Tanpa Gading". [Online] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140224_sumatraelephants, 2014 [Diakses 10 Juni 2017]
- CNN Indonesia . 'Provokator' Perdamaian dari

- dan-hiunya-sekarang-bravonur), 2016. [Diakses 31 Maret 2017]
- National Geographic Indonesia. *Kematian Gajah Yani Cerminkan Buruknya Tata Kelola Kebun Binatang Bandung* [Online] <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/kematian-gajah-yani-cerminkan-buruknya-tata-kelola-kebun-binatang-bandung>, 2016 [Diakses 10 Juni 2017]
- Scorpion Monitor, *Cruelty Continues, Scorpion Demands President Jokowi to Stop Circuses and Wildlife Attractions*. (<http://www.scorpionmonitor.org/content/news/Cruelty-Continues-Scorpion-Demands-President-Jokowi-to-Stop-Circuses-and-Wildlife-Attractions-May-17-2017-.html>), 2017. [Diakses 24 April 2017]
- Scorpion Monitor, *Cruelty to Elephants Continues in Mangkang Zoo (Semarang), Central Java*. (<http://www.scorpionmonitor.org/content/news/Cruelty-to-Elephants-Continues-in-Mangkan-Zoo-Semarang-Central-Java-May-13-2017-.html>), 2017. [Diakses 24 April 2017]
- Sukmantoro, Wishnu. *Sulitnya perlindungan gajah?* [Online] <http://www.wwf.or.id/?56928/Sulitnya-perlindungan-gajah>, 2017 [Diakses 10 Juni 2017]
- Suwarno, B. H. *Alih Fungsi Lahan Hutan di Indonesia*. Dalam situs resmi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan [Online] <http://www.blh.jogjaprovo.go.id/detailpost/alih-fungsi-lahan-hutan-di-indonesia>, 2017 [Diakses 11 Juni 2017]
- Tempo.co. *Aktivis Tolak Komersialisasi Hutan Kota Babakan Siliwangi Bandung*. [Online] <https://m.tempo.co/read/video/2013/05/23/956/Aktivis-Tolak-Komersialisasi-Hutan-Kota-Babakan-Siliwangi-Bandung>, 2013 [Diakses 24 April 2017]
- Tempo.co. *Kebun Binatang Surabaya Terkejam di Dunia, Kenapa?* [Online] <https://m.tempo.co/read/news/2014/01/08/206543092/kebun-binatang-surabaya-terkejam-di-dunia-kenapa>, 2014 [Diakses 10 Juni 2017]
- Wisnu Wardana, *#RIPYongki Hentikan Penjualan Produk yang Terbuat dari Gading Gajah di Toko Online* (<https://www.change.org/p/bukalapak-tokopedia-lazadaid-hentikan-penjualan-produk-dari-gading-gajah-ripyongki>), 2015. [Diakses 31 Maret 2017]
- WWF. *Ancaman Bagi Populasi Hiu*. [Online] Tautan:http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/sains_kelautan_dan_perikanan/konservasi_hiu/index.cfm [Diakses 10 Juni 2017]
- Yayasan Scorpion Indonesia, *Lepas Belenggu Gajah di Kebun Binatang Surabaya* (<https://www.change.org/p/bravonur-lepas-belenggu-gajah-di-kebun-binatang-surabaya>), 2016. [Diakses 31 Maret 2017]